

# Proses Temuan Biaya Perjalanan Dinas Dewan

Yulan Mirza  
Borneo Tribune, Pontianak

Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang sama pada waktu bersamaan dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya sebesar Rp 27.300.000 harus diproses.

BPK RI menemukan terdapat perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan empat orang anggota DPRD yang bersamaan waktunya dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya.

Kemudian terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sidang dalam TA 2010 sebesar Rp 48.600.000, selain itu terdapat realisa-

si belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan reses TA 2010 sebesar Rp 7.100.000.

Sehingga hal itu mengakibatkan adanya realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kalbar beridikasi merugikan daerah Rp. 83.000.000 (Rp 27.000.000 + Rp 48.600.000 + Rp 7.100.000)

yang disebabkan, Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar selaku pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengesahan atas beban APBD, dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan. Dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Provinsi

Kalbar dalam memverifikasi pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas adanya temuan tersebut, Ketua LPS AIR Kalbar, Deman Huri menegaskan bahwa temuan BPK RI ini harus dilanjutkan. Mengingat anggaran perjalanan dinas itu juga merupakan uang rakyat Kalbar itu sendiri.

"Kalau memang terindikasi tindak pidana korupsi, seharusnya mereka harus diperiksa. Karena, terindikasi perjalanan dinas itu menggunakan modus pengelambungan anggaran perjalanan dinas. Dan sudah seharusnya mereka harus diproses menurut hukum yang berlaku," tegas Deman.

Masih kata Deman, seharusnya perjalanan dinas

yang dinilai tidak menguntungkan bagi rakyat itu seharusnya dipangkas/dipotong. Mengingat anggaran yang dikeluarkan DPRD Kalbar untuk perjalanan dinas itu memakan dana jutaan rupiah.

"Jika anggaran perjalanan dinas itu dipangkas dan dialihkan untuk kepentingan kepada rakyat kan lebih baik. Mengingat anggaran di dalam APBD tahun 2011 untuk dinas pendidikan terbilang cukup kecil. Padahal, anggaran pendidikan itu harus mencapai 20 persen. Dan ternyata, Kalbar hanya meloloskan 3,72 persen saja," terang mantan aktivis Kalbar ini.

Ditambahkannya lagi, seharusnya dana-dana public maupun perjalanan dinas yang tidak menguntungkan

bagi masyarakat Kalbar, seyogyanya dapat dialihkan ke instansi yang masih memerlukan anggaran cukup besar. Seperti Dinas Pendidikan ataupun dinas yang lain.

"Perjalanan dinas itu bukan dijadikan proyek. Karena perjalanan dinas itu tidak hanya untuk pembelian tiket. Tetapi ada yang lainnya. Seperti penginapan dan sebagainya. Bisa jutaan itu sekali jalan mereka. Kalau memang tidak bermanfaat, lebih baik dipotong," paparnya.

Ditanya apakah ini dapat dikatakan kesalahan Sekretaris Dewan DPRD Kalbar beserta stafnya dan bukan kesalahan anggota DPRD, Deman menilai bahwa penilaian itu salah. Menurut Deman, sebelum mengajukan proses anggaran itu su-

dah ada mekanismenya. Ya itu harus melalui badan anggaran.

"Tidak mungkin lah. Itu kan dibahas di dalam banang (badan anggaran) bersama panita anggaran dan anggaran itu sudah diparipurnakan. Jadi tidak mungkin lah kalau kesalahan itu hanya kepada sekretaris dewan. Tetapi juga kepada anggota DPRD juga," kata Deman.

Lebih lanjut Deman mengatakan bahwa proses awal dalam pembahasan anggaran itu sudah terindikasi modus-modus korupsi. Seperti anggaran perjalanan dinas. Baik itu kepala dinas, perseorangan ataupun instansi. Disana, anggaran perjalanan dinas cukup banyak ditemukan kejanggalan.

"Kami pernah menemu-

kan data bahwa ada suatu dinas yang melakukan perjalanan dinas itu bisa mencapai 150 atau 350 kali melakukan perjalanan dinas. Hal ini cukup membuat kita menjadi miris. Seharusnya, dana-dana public itu tidak tersedot kepada perjalanan dinas. Melainkan bisa dialihkan ke kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi kalau dewan tidak tahu, tidak mungkin lah," ucapnya.

Oleh sebab itu, Deman berharap kepada anggota DPRD Kalbar yang terlibat di dalam perjalanan dinas yang diluar kewajaran itu, dapat mengembalikan anggaran tersebut. Dan kalau bisa lanjut Deman, anggaran tersebut agar dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. □